

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/PUU-XIX/2021

### B. Buku-Buku

Asikin, Z. (2013). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Christiawan, R. (2020). *Hukum Kepailitan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Ginting, E. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Hoff, J. (2000). *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa.

Kartono. (1974). *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Muhammad, A. (1980). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Muhammad, A. (1999). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- Nitisusatro, M. (2013). *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Poesoko, H. &. (2016). *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Prakoso, D. d. (2010). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Binda Aksara.
- Sastrawidjaja, M. (2010). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni.
- Shubhan, H. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Simanjuntak, E. (1980). *Seksi Hukum Dagang*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Yogyakarta.
- Sjahdeni, S. (2002). *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeni, S. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sutedi, A. (2007). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, G. d. (2007). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, A. (2017). *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

### C. Jurnal

- Pratama, G. A. (2021). *Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia*. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1).
- Pamungkas, R. T. (2021). *Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicaput Izin Usahanya*. *Lex Renaissance*, 6(2), 349–359
- Hazhin, U. M. & Diaz, M. R. (2022). *Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi*. *NEGARA HUKUM: Vol. 13*
- Juditia Damlah, *Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, *Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 2 Mar-Apr 2017*

### D. Internet

- Asuransi Kresna Life Resmi Pailit 2022  
<https://lifepal.co.id/asuransi/kresna-life/> diakses pada tanggal 16 Januari 2023
- Asuransi Kresna Life <http://www.kresnalife.com/about-us/company-profile> diakses pada tanggal 16 Januari 2023
- Siaran Pers: OJK Keluarkan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Asuransi Jiwa Kresna  
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Sanksi-Pembatasan-Kegiatan-Usaha-Asuransi-Jiwa-Kresna.aspx> diakses pada tanggal 7 Oktober 2022
- Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2019-2021  
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1080/1/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

Putusan Verstek dan Upaya Hukum Kita

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html>

diakses pada tanggal 13 Januari 2023

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020

[https://bphn.go.id/data/documents/13\\_buku\\_dphn.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/13_buku_dphn.pdf) diakses pada tanggal 4

Oktober 2022

Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/id/FAQ.aspx> diakses pada tanggal 7

Oktober 2022

